



# Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi SDM, dan Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah KSB)

Ratilus Sulcat<sup>1</sup>, Ahmad Yamin<sup>2</sup>, Nova Adhitya Ananda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: [ratilusse@gmail.com](mailto:ratilusse@gmail.com), [ahmad.yamin@uts.ac.id](mailto:ahmad.yamin@uts.ac.id), [nova.adhitya.ananda@uts.ac.id](mailto:nova.adhitya.ananda@uts.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2024-09-07 Revised: 2024-10-27 Published: 2024-11-11	This study aims to analyze the influence of planning, HR competence and procurement of goods and services on the level of Budget Absorption for Procurement of Goods and Services in the Regional Apparatus Organization of KSB. This study uses quantitative methodology and uses descriptive techniques to analyze data. The research sample consisted of 100 respondents who were civil servants working in regional apparatus organizations (OPD), West Sumbawa Regency (KSB). Data were analyzed using the Partial Least Square (PLS) method which is included in the Structural Equation Modeling (SEM) domain. The results of the study indicate that planning has a positive and significant effect on budget absorption, HR competence has a positive and significant effect on budget absorption and procurement of goods and services has a positive and significant effect on budget absorption. Then the three variables are able to influence the absorption of the Procurement of Goods and Services budget in the Regional Apparatus Organization of KSB simultaneously. The conclusion means that good planning, increasing HR competence, and an efficient procurement process individually contribute to increasing the effectiveness of budget absorption. In addition, the study also revealed that these three variables are simultaneously able to influence the absorption of the procurement of goods and services budget in the Regional Apparatus Organization (OPD) in West Sumbawa Regency (KSB). This finding emphasizes the importance of synergy between thorough planning, high HR competency, and an efficient procurement system to achieve optimal budget absorption and support the achievement of overall organizational goals.
<b>Keywords:</b> <i>Planning;</i> <i>HR Competence;</i> <i>Procurement of Goods and Services;</i> <i>Budget Absorption.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2024-09-07 Direvisi: 2024-10-27 Dipublikasi: 2024-11-11	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan, kompetensi SDM dan pengadaan barang dan jasa terhadap tingkat Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang Dan Jasa pada Organisasi Perangkat Daerah KSB. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dan menggunakan teknik deskriptif untuk menganalisis data. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di organisasi perangkat daerah (OPD), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Data dianalisis dengan metode Partial Least Square (PLS) yang termasuk dalam domain Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, kompetensi SDM positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Kemudian ketiga variabel tersebut mampu mempengaruhi penyerapan anggaran Pengadaan Barang Dan Jasa pada Organisasi Perangkat Daerah KSB secara simultan. Kesimpulannya berarti bahwa perencanaan yang baik, peningkatan kompetensi SDM, dan proses pengadaan yang efisien secara individual berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas penyerapan anggaran. Selain itu, penelitian juga mengungkap bahwa ketiga variabel ini secara simultan mampu mempengaruhi penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara perencanaan yang matang, kompetensi SDM yang tinggi, dan sistem pengadaan yang efisien untuk mencapai penyerapan anggaran yang optimal dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.
<b>Kata kunci:</b> <i>Perencanaan;</i> <i>Kompetensi SDM;</i> <i>Pengadaan Barang dan Jasa;</i> <i>Penyerapan Anggaran.</i>	

## I. PENDAHULUAN

Di berbagai daerah di Indonesia, sering kali ditemukan bahwa realisasi penggunaan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan perencanaan (Ferdinan dkk., 2020). Hal

ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti perencanaan yang kurang matang, proses birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang mengelola anggaran, hingga masalah pada kualitas dan

ketersediaan data. Rendahnya penyerapan anggaran ini tidak hanya berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi juga bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah daerah (Ananda dkk., 2022). Penyerapan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian efektivitas pengelolaan keuangan negara. Menurut Lestari & Yuliani (2022), anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa harus dikelola dengan baik sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan kemajuan pembangunan daerah. Namun, fenomena yang sering terjadi adalah rendahnya tingkat penyerapan anggaran, yang mana dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut.

Di Indonesia, terdapat sebuah lompatan signifikan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan negara yang diinisiasi melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, sering disebut sebagai UU Otonomi Daerah, serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Zarefar & Putra (2021), kedua undang-undang tersebut telah menetapkan dasar hukum yang kuat bagi penerapan otonomi daerah di Indonesia, memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sumber daya keuangannya sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Menurut Harahap (2020), keputusan strategis ini memicu implementasi kebijakan desentralisasi yang secara substansial mengalokasikan tanggung jawab pengelolaan keuangan dan sumber daya lainnya ke daerah-daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 menambahkan dimensi evaluatif dalam pengelolaan keuangan daerah melalui penekanan pada indikator penyerapan anggaran sebagai ukuran kinerja dalam aspek implementasi. Menurut Puluala (2021), penyerapan anggaran menjadi tolak ukur penting karena mencerminkan kemampuan sebuah daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan program dan proyek yang telah dianggarkan, yang secara langsung berdampak pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi idealnya menandakan bahwa pemerintah daerah mampu melaksanakan program-program pembangunan secara efektif, sekaligus merespons kebutuhan dan prioritas

masyarakat secara tepat waktu (Ratag & Kumenaung, 2021).

Menurut Patiran dan Bonsapia (2021), dinamika pelaksanaan kebijakan dan juga pengelolaan keuangan daerah ini tidak lepas dari tantangan. Pengalaman dari berbagai daerah menunjukkan adanya kesulitan dalam mencapai tingkat penyerapan anggaran yang optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran meliputi, namun tidak terbatas pada, keterlambatan dalam proses perencanaan dan pengadaan, hambatan birokrasi, masalah dalam kapasitas sumber daya manusia, serta rendahnya kemampuan dalam perencanaan dan pengelolaan proyek. Menurut Furqana & Handayani (2022), hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dan reformasi proses di dalam pemerintah daerah agar mampu mengelola keuangan dengan lebih efektif dan efisien.

Menurut Wandari dkk. (2021), penerapan otonomi daerah memang dirancang untuk membawa kebijakan lebih dekat dengan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. Menurut Kuntadi & Nugroho (2023), untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa penyerapan anggaran dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Strategi peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pembangunan sistem pengawasan yang lebih baik, serta inovasi dalam manajemen dan teknologi merupakan beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi tantangan ini. Menurut Setiadi (2023), keberhasilan dalam penyerapan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah merupakan bukti nyata dari kematangan praktik otonomi daerah di Indonesia, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Salah satu dimensi krusial dalam penyerapan anggaran adalah keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa (Bitu, 2022). Keterlambatan ini sering dikaitkan dengan ketidakcukupan dalam perencanaan yang sistematis dan terstruktur, sehingga proses penenderan dan pelaksanaan kerja bisa terhambat. Kekurangan dalam perencanaan seringkali berkaitan dengan pengidentifikasian kebutuhan yang tidak akurat, perubahan kebijakan, atau ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi yang ada (Putri dan Sujana,

2022). Keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu hambatan penting yang seringkali mengganggu penyerapan anggaran dalam banyak sektor pemerintahan. Menurut Hasan dkk. (2024), proses tersebut merupakan unsur integral dari siklus pelaksanaan anggaran dan membutuhkan perhatian khusus mengingat dampak yang dapat ditimbulkannya pada efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Dalam berbagai kasus, keterlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tapi tidak terbatas pada prosedur pengadaan yang kompleks, perubahan regulasi yang tidak konsisten, serta tantangan dalam manajemen kontrak. Menurut Rumpang (2022), prosedur pengadaan yang ketat dan seringkali berbelit-belit diharapkan dapat menjamin transparansi dan rendahnya tingkat korupsi, namun pada praktiknya dapat menyebabkan keterlambatan yang signifikan dalam pemenuhan kebutuhan baik barang maupun jasa. Proses tender yang memerlukan waktu lama, validasi dan verifikasi dokumen yang berlebihan, serta kesulitan dalam negosiasi kontrak seringkali menambah durasi proses pengadaan barang dan jasa tersebut.

Di sisi lain, kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa juga sangat menentukan (Rahmawati dkk., 2021). Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang pengadaan yang baik seringkali menjadi penghambat utama. Ini menciptakan ketidakpastian dalam pengelolaan anggaran yang efisien. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Terlebih lagi, dalam konteks reformasi birokrasi, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem pengawasan yang lebih baik dan mekanisme feedback yang efektif dari masyarakat. Menurut Rahmiati dkk. (2023), pengawasan yang baik dapat meminimalisir penyelewengan dan juga memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan secara adil dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

Penyerapan anggaran yang efektif dan efisien menjadi sangat kritis dalam pengelolaan keuangan daerah, terlebih dalam era otonomi yang menuntut akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik (Yuniarta & Sujana, 2024). Perencanaan anggaran yang baik dikenali sebagai salah satu pendorong utama penyerapan anggaran yang optimal. Syahwildan & Damayanti (2022), menekankan pentingnya fondasi yang kuat dalam perencanaan anggaran, yang

mencakup identifikasi kebutuhan serta pengaturan prioritas yang selaras dengan tujuan strategis daerah. Perencanaan yang matang juga memastikan alokasi sumber daya yang tepat guna mendukung inisiatif pemerintah daerah dan menghadapi berbagai tantangan sosial ekonomi yang ada. Begitu jengon dengan Kristianingsih dkk. (2022), menjelaskan bahwa pelaksanaan anggaran merupakan fase dimana rencana dan kebijakan diwujudkan ke dalam aksi nyata. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2019 menyatakan bahwa aktivitas ini menuntut ketelitian dalam pengaturan dan pencapaian target yang telah ditentukan. Hal ini mencakup tidak hanya realisasi program-program yang telah direncanakan, tetapi juga penanganan tantangan dan peluang yang muncul selama proses pembangunan berjalan.

Secara keseluruhan, penyerapan anggaran yang baik mencerminkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang solid, di mana perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, pencatatan administrasi yang akurat, serta kualitas SDM yang mumpuni, menjadi komponen-komponen inti (Sirin, 2020). Komponen-komponen ini saling terkait dan membutuhkan sinergi yang terpadu agar dapat mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiadi (2023), penyerapan anggaran yang optimal tidak hanya mendukung pencapaian target pembangunan daerah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam mengelola sumber keuangan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri.

Dalam beberapa tahun terakhir, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya pada tingkat daerah, telah mengalami perkembangan signifikan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya pemerintah pusat dalam mendorong pemerintah daerah untuk memiliki otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan keuangannya, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa. Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai salah satu daerah yang berada di Nusa Tenggara Barat, tidak terkecuali dalam menghadapi tantangan-tantangan yang berkaitan dengan penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa. Penyerapan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah menjadi topik yang penting karena seringkali menjadi proxy atau indikator dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan pengamatan awal, menunjukkan

bahwa terdapat fluktuasi dalam capaian penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa dari tahun ke tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa di daerah ini. Isu-isu seperti keterlambatan proses pengadaan, kesulitan dalam menyesuaikan dengan regulasi yang berubah-ubah, serta kapasitas SDM yang terbatas, menjadi beberapa hal yang melatarbelakangi fenomena tersebut.

Berdasarkan pada fenomena dan permasalahan yang dijelaskan oleh penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh mengenai proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sumbawa Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Maka dari itu penulis tertarik menganalisis dan mendeskripsikan masalah tersebut dengan judul, "Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi SDM, dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah KSB)".

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Terdapat tiga variabel independen yang diteliti, yaitu perencanaan anggaran (X1), kompetensi SDM (X2), dan pengadaan barang dan jasa (X3), serta satu variabel dependen, penyerapan anggaran (Y), yang diteliti pada OPD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selama Mei-Juni 2024.

Populasi penelitian adalah 3.133 PNS di OPD KSB, dengan sampel sebanyak 100 responden, dihitung menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengevaluasi hubungan antarvariabel, dengan pengujian validitas menggunakan Pearson's Product Moment dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha. Hasil menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini valid dan reliabel, dengan nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,6 untuk semua variabel.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Uji Asumsi Klasik

Menurut Sugiyono (2020), uji asumsi klasik adalah serangkaian tes yang dilakukan untuk memastikan bahwa data dalam analisis regresi memenuhi beberapa

asumsi dasar yang diperlukan untuk menghasilkan estimasi yang valid dan reliabel. Berikut adalah beberapa uji asumsi klasik yang sering dilakukan dalam analisis regresi:

#### a) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sebaran data dalam sebuah kelompok data atau variabel berdistribusi normal atau tidak.

**Tabel 1.** Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.22346348
Most Extreme Differences	Absolute	.056
	Positive	.076
	Negative	-.076
Test Statistic		.056
Asymp. Sig. (2-tailed)		.272 <sup>c, d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: data diolah, 2024

Uji normalitas yang dilakukan pada tabel 6 di atas, dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,272. Jika membandingkan nilai signifikansi 0,272 dengan nilai probabilitas 0,05, terlihat bahwa nilai signifikansi lebih tinggi dari nilai probabilitas, maka hal ini menunjukkan bahwa data residual mengikuti distribusi normal.

#### b) Uji Multikolinearitas

Menurut yang telah dinyatakan oleh Field (2018), tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya hubungan antar variabel yang dianggap independen atau tidak. Berikut ini adalah daftar hasil uji multikolinearitas yang dilakukan dalam penelitian ini:

**Tabel 2.** Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.322	3.210		1.978	.048		
Perencanaan Anggaran X1	.212	.152	.331	2.091	.041	.621	1.112
Kompetensi SDM X2	.678	.175	.671	5.211	.000	.659	1.387
Pengadaan Barang dan Jasa X3	.712	.182	.325	3.748	.006	.516	1.661

Sumber: data diolah, 2024

Masing-masing variabel memiliki nilai VIF yang kurang dari 10, dan nilai tolerance yang lebih besar dari 0,1, yang mengindikasikan tidak adanya multi-kolinieritas antar variabel independen. Hal ini terlihat dari hasil analisis yang disajikan pada tabel 7 di atas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau tidak (Anshori, 2020). Apabila nilai probabilitas (sig) lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 3.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	6.322	3.210		1.978	.048		
Perencanaan Anggaran_X1	.212	.152	.331	2.891	.041	.621	1.112
Kompetensi SDM_X2	.678	.175	.671	5.211	.000	.659	1.387
Pengadaan Barang dan jasa_X3	.712	.182	.325	3.748	.006	.516	1.861

Sumber: data diolah, 2024

Nilai signifikan dari variabel perencanaan anggaran (X1), kompetensi SDM (X2), dan pengadaan barang dan jasa (X3) pada tabel 8 di atas, semuanya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel-variabel tersebut.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Data hasil penelitian ini diolah dengan bantuan program SPSS 25 untuk menguji hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran, kompetensi SDM dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

**Tabel 4.** Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>					t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.		
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	6.322	3.210		1.978	.048		
Perencanaan Anggaran_X1	.212	.152	.331	2.891	.041		
Kompetensi SDM_X2	.678	.175	.671	5.211	.000		
Pengadaan Barang dan jasa_X3	.712	.182	.325	3.748	.006		

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 9 di atas dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 6,322 + 0,212X_1 + 0,678X_2 + 0,712X_3$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- a) Nilai konstanta sebesar 6,322 berarti bahwa jika variabel perencanaan anggaran, kompetensi SDM dan pengadaan barang dan jasa sama dengan satu, maka penyerapan anggaran pada pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) adalah sebesar 6,322.
- b) Nilai koefisien b1 = 0,212 X1, koefisien ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam perencanaan anggaran (X1), dengan asumsi variabel lainnya konstan, akan meningkatkan penyerapan anggaran (Y) sebesar 0,212 unit. Ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.
- c) Nilai koefisien b2 = 0,678 X2, koefisien ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam kompetensi SDM (X2), dengan asumsi variabel lainnya konstan, akan meningkatkan penyerapan anggaran (Y) sebesar 0,678 unit. Ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penyerapan anggaran, dan pengaruhnya lebih besar dibandingkan dengan perencanaan anggaran.
- d) Nilai koefisien b3 = 0,712 X3, koefisien ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam pengadaan barang dan jasa (X3), dengan asumsi variabel lainnya konstan, akan meningkatkan penyerapan anggaran (Y) sebesar 0,712 unit. Ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh positif yang sangat kuat terhadap penyerapan anggaran, dan pengaruhnya adalah yang terbesar di antara ketiga variabel independen.

3. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi dihitung berdasarkan nilai corrected R-square, yang ditampilkan pada tabel 10 di bawah ini:

**Tabel 5.** Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.625	.565	1.28226	2.72136

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan informasi yang diberikan pada tabel 10 di atas, nilai R Square adalah sebesar 0,625. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran (X1), kompetensi SDM (X2), dan pengadaan barang dan jasa (X3) secara bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 62,5% terhadap variabel penyerapan anggaran pada OPD di KSB (Y). Sisanya sebesar 37,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

#### 4. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis (Uji t) secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu perencanaan anggaran, kompetensi SDM, dan pengadaan barang dan jasa, terhadap variabel dependen penyerapan anggaran pada OPD di KSB. Berdasarkan regresi linier berganda, uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel (Sugiyono, 2020). Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika t-hitung > t-tabel, maka variabel independen (X1, X2, dan X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Sebaliknya, jika t-hitung < t-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang dimaksud tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 6.** Hasil Uji Hipotesis

Variabel Dependen	Beta	t-hitung	Sig.	t-tabel
Perencanaan Anggaran_X1	.331	2.891	.041	
Kompetensi SDM_X2	.671	5.211	.000	1,978
Pengadaan Barang dan Jasa_X3	.325	3.748	.006	

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 11 di atas, dapat dijelaskan hasil pengujian dengan uji parsial (uji t) untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

a) Untuk variabel Perencanaan Anggaran (X1), nilai koefisien beta adalah 0.331

(positif). Ini berarti bahwa setiap peningkatan satu unit dalam perencanaan anggaran akan meningkatkan penyerapan anggaran sebesar 0.331 unit, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai t-hitung sebesar 2.891 lebih besar dari t-tabel yang bernilai 1.978, dan nilai signifikan (Sig.) adalah 0.041. Karena nilai Sig. lebih kecil dari 0.05, dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, berdasarkan pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima.

b) Untuk variabel Kompetensi SDM (X2), nilai koefisien beta adalah 0.671 (positif). Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam kompetensi SDM akan meningkatkan penyerapan anggaran sebesar 0.671 unit. Nilai t-hitung untuk variabel ini adalah 5.211, yang jauh lebih besar dari t-tabel sebesar 1.978. Nilai Sig. adalah 0.000, yang menunjukkan tingkat signifikansi yang sangat tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap penyerapan anggaran, berdasarkan pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima.

c) Untuk variabel Pengadaan Barang dan Jasa (X3), nilai koefisien beta adalah 0.325 (positif). Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam pengadaan barang dan jasa akan meningkatkan penyerapan anggaran sebesar 0.325 unit. Nilai t-hitung sebesar 3.748 juga lebih besar dari t-tabel sebesar 1.978, dan nilai signifikan (Sig.) adalah 0.006. Karena nilai Sig. lebih kecil dari 0.05, dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, berdasarkan pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima.

## B. Pembahasan

1. Pengaruh Perencanaan anggaran (X1) Terhadap Penyerapan Anggaran (Y) Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis secara parsial yang telah

dilakukan sebelumnya, membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada OPD di KSB. Artinya, ketika perencanaan anggaran dilakukan dengan lebih baik, penyerapan anggaran di OPD KSB juga akan meningkat. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam perencanaan anggaran berkorelasi langsung dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Selain itu, signifikansi hasil ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak terjadi secara kebetulan dan memiliki relevansi statistik yang kuat. Dengan demikian, fokus pada peningkatan kualitas perencanaan anggaran di OPD KSB dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandari dkk. (2021), yang menemukan bahwa perencanaan anggaran yang baik memiliki korelasi positif dengan efektivitas penyerapan anggaran di pemerintah daerah. Nurhayati menjelaskan bahwa perencanaan yang matang dan detail dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan anggaran dengan lebih akurat, sehingga mengurangi risiko pemborosan dan meningkatkan penggunaan anggaran secara efisien. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ananda dkk. (2022), yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang komprehensif dan partisipatif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penyerapan anggaran. Ananda menyebutkan bahwa partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan anggaran dapat memastikan alokasi dana yang lebih tepat sasaran dan mengurangi hambatan dalam implementasi anggaran.

## 2. Pengaruh Kompetensi SDM (X2) Terhadap Penyerapan Anggaran (Y) Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)

Berdasarkan dari pada hasil pengujian hipotesis secara parsial yang telah dilakukan sebelumnya, membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran pada OPD

di KSB. Artinya, Ketika kompetensi sumber daya manusia (SDM) meningkat, penyerapan anggaran juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pegawai yang lebih kompeten memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan menggunakan anggaran secara efektif. Pegawai dengan kompetensi tinggi dapat membuat perencanaan anggaran yang lebih akurat dan realistis, mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas dengan tepat, serta menghindari pemborosan. Selain itu, mereka juga mampu mengelola keuangan dengan lebih efisien, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan anggaran, serta memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kompetensi yang tinggi juga memungkinkan pegawai untuk mengambil keputusan yang tepat terkait alokasi dan penggunaan anggaran, melakukan analisis biaya-manfaat dengan akurat, dan mengidentifikasi potensi penghematan atau efisiensi. Dengan kemampuan analisis yang mendalam, mereka dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang terkait dengan pengelolaan anggaran. Implementasi program dan kegiatan yang didanai anggaran juga menjadi lebih efektif, dengan pengaturan sumber daya dan waktu yang baik, memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran juga meningkat, karena pegawai yang kompeten memahami pentingnya pelaporan yang akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, peningkatan kompetensi SDM berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan efektivitas penyerapan anggaran, memastikan setiap dana yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Zarefar dkk. (2021) menemukan bahwa ada korelasi positif antara tingkat kompetensi SDM dengan efektivitas penyerapan anggaran di sektor publik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pegawai yang lebih terampil dan berpengetahuan mampu memaksimalkan

penggunaan anggaran untuk program dan proyek yang bermanfaat, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, penelitian oleh Setiadi (2023) juga menyimpulkan bahwa peningkatan pelatihan dan pengembangan SDM secara langsung berkontribusi pada peningkatan kemampuan manajerial dalam pengelolaan anggaran. Pegawai yang kompeten juga mampu mengelola keuangan dengan lebih efisien, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan anggaran, serta memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kompetensi yang tinggi memungkinkan pegawai untuk mengambil keputusan yang tepat terkait alokasi dan penggunaan anggaran, melakukan analisis biaya-manfaat dengan akurat, dan mengidentifikasi potensi penghematan atau efisiensi. Dengan kemampuan analisis yang mendalam, mereka dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang terkait dengan pengelolaan anggaran.

### 3. Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa (X3) Terhadap Penyerapan Anggaran (Y) Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis secara parsial yang telah dilakukan sebelumnya, membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran pada OPD di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Artinya, jika pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan lebih baik atau lebih banyak, maka anggaran yang tersedia cenderung diserap atau digunakan dengan lebih efektif pada OPD di KSB. Ketika pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan lebih baik, artinya proses pengadaan dilakukan dengan efisien dan transparan, memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang telah direncanakan. Pengadaan yang efisien berarti menghindari pemborosan dan memastikan harga yang kompetitif, sehingga dana yang tersedia dapat digunakan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan tanpa ada kelebihan biaya. Pengadaan yang baik memastikan bahwa barang dan jasa yang dibeli adalah yang

berkualitas tinggi dan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Ini berarti bahwa barang dan jasa tersebut dapat digunakan lebih efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD, sehingga anggaran yang digunakan memberikan hasil yang maksimal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kuntadi dan Nugroho (2023) dimana Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan pelatihan dan pengembangan kompetensi dalam manajemen pengadaan secara langsung meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Studi tersebut menunjukkan bahwa pegawai yang lebih terampil dalam proses pengadaan mampu merencanakan dan mengalokasikan dana dengan lebih baik, sehingga meminimalkan pemborosan dan memastikan dana digunakan untuk tujuan yang tepat. Selain itu, dalam penelitian Puluala (2021), ditemukan bahwa OPD yang memiliki sistem pengadaan yang lebih canggih dan terotomatisasi menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang lebih tinggi. Sistem ini membantu dalam mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk proses pengadaan, memungkinkan anggaran dialokasikan ke area yang lebih produktif. Menurut Puluala (2021), sistem pengadaan yang canggih dan terotomatisasi mampu mempercepat berbagai tahapan dalam proses pengadaan, mulai dari identifikasi kebutuhan, pemilihan vendor, hingga penyelesaian kontrak. Dengan otomatisasi, banyak pekerjaan manual yang memakan waktu dapat diselesaikan lebih cepat dan dengan lebih sedikit kesalahan. Hal ini berarti proses pengadaan bisa dilakukan dalam waktu yang lebih singkat, memungkinkan OPD untuk segera memanfaatkan barang dan jasa yang telah diadakan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berikut ini dapat disimpulkan dari hasil dan pembahasan yang dipaparkan oleh peneliti sebelumnya:

1. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Hal ini

dilihat dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,891 dengan taraf signifikan hasil sebesar 0,041 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima.

2. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Hal ini dilihat dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t-hitung sebesar 5,211 dengan taraf signifikan hasil sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima.
3. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Hal ini dilihat dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,748 dengan taraf signifikan hasil sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima.

## B. Saran

Berdasarkan pada temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan, peneliti bermaksud untuk menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam investigasi ini. Rekomendasi-rekomendasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran, sangat penting untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di OPD. Ini dapat dilakukan melalui berbagai pelatihan dan program pengembangan profesional yang fokus pada keterampilan manajerial, perencanaan, pengadaan, serta pengelolaan keuangan. Dengan memiliki pegawai yang kompeten dan terlatih, proses perencanaan dan pengadaan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif, sehingga memastikan anggaran digunakan secara optimal. Selain itu, program sertifikasi dan evaluasi berkala terhadap kinerja pegawai juga dapat membantu memastikan bahwa

kompetensi SDM selalu dalam kondisi optimal.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai sistem perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahap pengadaan berjalan sesuai dengan rencana dan regulasi yang berlaku. OPD perlu mengimplementasikan sistem perencanaan yang terstruktur dan berbasis data untuk mengidentifikasi kebutuhan secara akurat dan merencanakan anggaran dengan lebih tepat. Penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan dan pengawasan, seperti sistem e-planning dan e-monitoring, dapat membantu dalam mengintegrasikan berbagai proses dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pengawasan yang ketat juga penting untuk mendeteksi dan mengatasi masalah sejak dini, sehingga dapat mengurangi risiko pemborosan atau penyalahgunaan anggaran.
3. Investasi dalam teknologi dan infrastruktur pengadaan yang lebih canggih dan terotomatisasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan. Implementasi sistem e-procurement, misalnya, dapat mempercepat proses pengadaan, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan transparansi. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pengelolaan data yang lebih baik, sehingga memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi penggunaan anggaran. OPD juga perlu mengembangkan regulasi dan kebijakan internal yang mendukung penggunaan teknologi ini, serta memastikan bahwa seluruh pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menggunakan sistem tersebut dengan efektif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ananda, T. S. P., Maria, M., & Sari, Y. (2022). Pengaruh perencanaan penganggaran dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap penyerapan anggaran. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 68-74.
- Anshori, M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif: Edisi 2*. Airlangga University Press.
- Bitu, S. H. S. (2022). *Pengaruh Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Di Masa Pandemi Covid-*

19 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).

- Ferdinan, F., Isnurhadi, I., Widiyanti, M., & Adam, M. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. *Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(2), 117-134.
- Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*. SAGE Publications Lt.
- Furqana, S., & Handayani, D. F. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(3), 513-529.
- Harahap, S. A. S., Taufik, T., & Azlina, N. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 13(1), 1-10.
- Hasan, A. S. P., Semmaila, B., & Nurpadilla, N. (2024). Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa Serta Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan PT PLN (Persero) Kabupaten Pinrang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2811-2825.
- Kristianingsih, E., Wahyudin, A., & Sukirman, S. (2022). Determinan Kualitas Penyerapan Anggaran Belanja Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perguruan Tinggi Negeri Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek). *Business and Economic Analysis Journal*, 2(2), 90-107.
- Kuntadi, C., & Nugroho, D. A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran: Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Serta Partisipasi Anggaran. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(3), 332-337.
- Lestari, L., & Yuliani, N. L. (2022, August). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa Dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja. In *UMMagelang Conference Series* (pp. 648-663).
- Patiran, A., & Bonsapia, M. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran Dan Pegawasan Terhadap Penyerapan Anggaran Melalui Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 16(1), 188-210.
- Puluala, M. G. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(1), 1-9.
- Putri, N. P. A. A., & Sujana, E. (2022). Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Ketidakpastian Lingkungan Dan Penggunaan E-Procurement Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12(1), 108-117.
- Rahmawati, R., Amir, A., & Junaidi, J. (2021). Evaluasi perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran dengan komitmen manajemen sebagai pemoderasi pada satuan kerja kementerian agama Republik Indonesia di Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*.
- Rahmiati, R., Samsiah, S., & Rodiah, S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Dan Penyusunan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran. *Research in Accounting Journal (RAJ)*, 3(3), 398-405.
- Ratag, W. A., Kumenaung, A. G., & Engka, D. S. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(3), 78-91.
- Rumpang, B. (2022). Pengaruh Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran terhadap Kinerja Organisasi Melalui Kinerja Karyawan di PT PLN (Persero) UIKL

- Sulawesi* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Setiadi, B. (2023). Pengaruh perencanaan, Kompetensi sumber daya manusia dan Komitmen organisasi terhadap Penyerapan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. *Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi (Kimfe)*, 2(1), 103-109.
- Sirin, A., Indarto, I., & Saddewisasi, W. (2020). Determinan penyerapan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai moderating variable. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 147-163.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrildan, M., & Damayanti, I. (2022). Analisis faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(1), 169-176.
- Wandari, R. S., Gunawan, A., & Nugraha, D. S. (2021). Pengaruh Perencanaan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 551-563.
- Yuniarta, G. A., & Sujana, E. (2024). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Regulasi Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(01), 119-130.
- Zarefar, A., & Putra, F. B. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada OPD Provinsi Riau). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 14(2), 221-230.